

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, menunjukkan upaya nyata untuk menegakkan hukum sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007. Melalui tindakan penindakan yang efektif, sosialisasi kepada masyarakat, dan kerjasama dengan instansi lain, DJBC tidak hanya berupaya menekan peredaran rokok ilegal tetapi juga menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip *Siyasah Dusturiyyah*. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon sangat signifikan. Melalui penindakan yang efektif, sosialisasi kepada masyarakat, dan kerjasama lintas instansi, DJBC tidak hanya berupaya menegakkan hukum tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung industri yang patuh pada peraturan. Tindakan ini sejalan dengan prinsip Ulil Amri dalam *Siyasah Dusturiyyah*, yang menekankan tanggung jawab pemimpin untuk menjalankan amanah demi kemaslahatan rakyat, keadilan sosial, serta transparansi dalam setiap tindakan yang diambil.

### **B. Saran**

1. Dengan menerapkan rekomendasi operasional tersebut, KPPBC dapat meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pemberantasan rokok ilegal. Peningkatan kapasitas SDM, kerjasama lintas sektor, penggunaan teknologi modern, program edukasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif

bagi pemberantasan barang ilegal. Hal ini tidak hanya akan melindungi pendapatan negara tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

2. Dengan menerapkan Penyederhanaan Prosedur Administrasi, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Peningkatan Kapasitas SDM, Kerjasama Lintas Sektor, Penguatan Sistem Pengawasan, Edukasi Masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan akan mendukung tata kelola yang lebih baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, penguatan kapasitas SDM, kerjasama lintas sektor, penguatan sistem pengawasan, serta edukasi masyarakat merupakan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas operasional DJBC dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Penelitian lanjutan mengenai aspek hukum dan tata kelola Islam sangat penting untuk memahami relevansi dan penerapan hukum Islam dalam konteks modern. Dengan fokus pada integrasi, implementasi, metodologi, tata kelola publik, keadilan sosial, serta tantangan era digital, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum Islam serta kebijakan publik yang lebih baik.

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**